



**LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BLEBERAN**

Nomor : 8

TAHUN 2025

**PERATURAN LURAH BLEBERAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BLEBERAN,

- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bupati nomor B/100.8.1/310/2025 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bleberan Tahun Anggaran 2026, maka perlu disusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bleberan Tahun Anggaran 2026;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bleberan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bleberan Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 11);
27. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Bleberan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2025 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDes Kalurahan Bleberan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2025 Nomor 5);
29. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN LURAH BLEBERAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

No	Uraian	RENCANA
1.	Pendapatan Kalurahan	
a.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 57.450.000,00
b.	Transfer	Rp. 2.153.000.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 2.500.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.212.950.000,00
2.	Belanja Kalurahan	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 1.087.820.465,00
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 830.153.932,00
c.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 173.990.029,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 22.222.500,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 64.600.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 2.178.786.926,00
	Surplus / Defisit	Rp. -34.163.074,00
3	Pembiayaan	Rp.
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 210.836.926,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
c.	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 245.000.000,00
	SILPA Tahun Anggaran Pembiayaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bleberan.

Ditetapkan : Di Bleberan
pada tanggal : 30 Desember 2025
LURAH BLEBERAN

ttd

BAMBANG FAJARUDIN

Diundangkan di Bleberan
pada tanggal : 30 Desember 2025
CARIK BLEBERAN

ttd

INDARDI

BERITA KALURAHAN BLEBERAN TAHUN 2025 NOMOR 8



**PEMERINTAH KALURAHAN BLEBERAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

LAMPIRAN - 2

**PERATURAN LURAH BLEBERAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN BLEBERAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH BLEBERAN
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KASI
ULU-ULU**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BLEBERAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	57.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.153.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.212.950.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.087.820.465,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	990.911.961,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.790.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.790.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	671.144.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	671.144.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.400.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	65.933.301,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.933.301,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.012.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.012.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.240.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.076.320,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.076.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.315.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.315.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.412.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.460.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.952.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.952.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.997.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.350.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.100.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	13.037.500,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.037.500,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearifan	3.510.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.632.999,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.725.000,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.725.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.350.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.160.999,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.999,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.050.000,00	PBP
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	10.712.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.712.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	2.600.000,00	ADD, DLL, PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.935.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.935.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.866.005,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	7.378.005,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.378.005,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.488.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.488.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>830.153.932,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	250.067.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	113.120.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.120.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	114.330.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.330.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	9.850.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.567.500,00	PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.567.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	467.403.932,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	138.959.395,00	ADD, DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.895,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	138.858.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	216.695.655,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	216.695.655,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	111.748.882,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	111.748.882,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.282.500,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	64.282.500,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.282.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>173.990.029,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	116.015.029,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.086.629,00	ADD, DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.086.629,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	106.353.400,00	ADD, DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	103.753.400,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.575.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.812.500,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	21.812.500,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.812.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.310.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.310.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.852.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	12.352.500,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.352.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.800.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	11.100.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.600.000,00	PBP
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.222.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.862.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.862.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.862.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.772.500,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.772.500,00	PBH, PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.772.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.137.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.825.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	5.312.500,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.312.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.450.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.450.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.178.786.926,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	34.163.074,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	210.836.926,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	245.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(34.163.074,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sawah I, 31 January 2025

LURAH

BAMBANG FAJARUDIN